

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan hak setiap orang, salah satunya adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dan juga tercantum dalam PERMENDIKNAS No. 70 tahun 2009 yang berbunyi “telah diberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan disekolah reguler pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah”.

Kabupaten Nganjuk sendiri telah melaksanakan program pendidikan inklusi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 dan program pendidikan inklusi telah di rintis oleh sejak tahun 2012 hingga di deklrasikan pada bulan desember tahun 2014.

Pendidikan disekolah reguler bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah disebut dengan pendidikan inklusi (Kekeh, dalam Fachmiansyah 2012).

Merujuk pada data dari Direktorat PSLB tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat jumlah anak berkebutuhan khusus yang telah mengikuti pendidikan formal mencapai 24,7% atau 78.689 anak dari populasi di Indonesia yaitu 318.600 anak. Pada tahun pelajaran 2013/2014 data anak berkebutuhan khusus (ABK) yang tertampung dalam sekolah inklusi dan

SLB (sekolah luar biasa) sejumlah 460 anak di Kabupaten Nganjuk (Direktorat PSLB tahun 2007). Berdasarkan pengambilan data awal oleh peneliti dari dua Sekolah Dasar inklusi diperoleh gambaran jenis ketunaan siswa inklusi sebagai berikut:

Tabel 1.1 jumlah siswa ABK di SDN Werungotok 2 dan SDN Klurahan 4

No	Jenis Ketunaan	Jumlah
1.	Lambat belajar	16 anak
2.	Tuna rungu wicara	3 anak
3.	Tuna netra	3 anak
4.	Autis	3 anak
5.	Tuna Grahita	6 anak
6.	Tuna daksa	2 anak
7.	Disleksia	1 anak
8.	Tuna ganda	1 anak
9.	Tuna grahita ringan	10 anak
10.	Tuna grahita sedang	1 anak
11.	ADHD	1 anak
Jumlah Siswa ABK		47 anak

Pendidikan inklusi yang telah disediakan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus diharapkan dapat membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lainnya. Pendidikan inklusi tidak hanya pengintegrasian anak dan remaja yang menyandang kecacatan fisik, sensori atau intelektual dalam sekolah reguler, atau hanya sebagai akses pendidikan bagi anak yang terkucilkan.

Sekolah inklusi sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Diharapkan dengan adanya sekolah inklusi dapat menjadi proses dua arah yaitu untuk meningkatkan partisipasi dalam hal belajar-mengajar dan mengidentifikasi atau mengurangi hambatan dalam belajar.

Idealnya dalam sekolah yang memiliki program pendidikan inklusi seharusnya memiliki beberapa syarat sehingga program pendidikan inklusi dapat berjalan secara efektif, beberapa syarat tersebut adalah kesiapan guru reguler dalam mengajar kelas inklusi, tersedianya fasilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tersedianya GPK untuk setiap kelas inklusi (Depdiknas, Dirjen Mandikdasmen, dan Direktorat PLB. 2007).

Fakta yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa pendidikan inklusi belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa fakta yang menyebabkan belum berjalannya pendidikan inklusi antara lain :

- a. Minimnya jumlah guru yang memiliki kompetensi mengajar dalam bidang inklusi
- b. Minimnya jumlah guru pendamping khusus (GPK)
- c. Kurangnya sarana dan prasarana

- d. Kenyataannya bahwa belum adanya penerimaan pada setiap guru terhadap program pendidikan inklusi

Berdasarkan hasil survey peneliti terhadap dua sekolah inklusi di Kabupaten Nganjuk dengan guru kelas inklusi yang hanya berjumlah 10-13 orang guru dengan 2-3 orang guru yang memiliki kemampuan dalam mengajar kelas inklusi tersebut. Beberapa guru yang memiliki kemampuan untuk mengajar inklusi sering memiliki peran ganda yakni sebagai guru kelas serta sebagai guru pendamping khusus dalam kelas inklusi lainnya. Di dalam sekolah inklusi juga terdapat beberapa guru yang tidak memiliki kemampuan mengajar kelas inklusi namun diwajibkan untuk mengajar kelas inklusi, hal ini menjadi sumber stres bagi guru-guru inklusi baik yang memiliki kemampuan mengajar kelas inklusi dan guru yang tidak memiliki kemampuan mengajar kelas inklusi.

Minimnya fasilitas dalam kelas inklusi juga menjadi beban kerja tersendiri karena guru-guru tersebut akan merasa kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa didik berkebutuhan khusus seperti tidak adanya bahan ajar berhuruf braille untuk anak yang mengalami tunanetra, alat untuk terapi, alat bantu dengar, dan alat bantu peraga.

Terbatasnya jumlah guru yang berperan sebagai pendamping khusus dalam setiap kelas inklusi (GPK), guru-guru pendamping untuk kelas inklusi pun masih banyak yang belum dipersiapkan kecuali beberapa guru dari sekolah luar biasa (SLB) dan beberapa guru honorer, sehingga

para guru-guru sekolah inklusi memiliki tugas yang berlipat-lipat selain harus mampu mengajar anak-anak dengan memodifikasi kurikulum para guru tersebut juga harus mampu memaksimalkan potensi belajar siswa reguler dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di kelas inklusi dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada.

Harapan serta tujuan diadakannya program pendidikan inklusi di beberapa kota dan daerah adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua ABK agar memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta pendidikan inklusi juga di harapkan mampu mewujudkan sebuah pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan pendidikan dan belajar bersama anak-anak normal lainnya di PAUD, Sekolah Dasar/Madrasah, SMP, dan SMA yang terdekat dari tempat tinggalnya.

Fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh pemerintah, penolakan yang terjadi pada setiap guru di sekolah-sekolah yang telah di tetapkan sebagai sekolah inklusi, guru yang secara tidak langsung menjalankan tugasnya dengan terpaksa karena harus merangkap sebagai GPK dan guru reguler padahal tidak semua guru memiliki kemampuan mengajar kelas inklusi, minimnya fasilitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu kendala dalam komunikasi antara guru dengan siswanya, pekerjaan guru reguler yang menjadi berlipat untuk memodifikasi kurikulum dan melaksanakan

kurikulum umum. Segala bentuk kendala yang terjadi di lapangan menjadi sumber stres bagi guru-guru inklusi di beberapa sekolah di Kabupaten Nganjuk.

Stres yang terjadi pada guru inklusi terjadi pada beberapa guru inklusi di SDN Klurahan 4 dan Wilangan 1 dengan gejala-gejala stres berupa kelelahan yang berlebih, sering merasa sakit kepala ketika, sering mengulang-ulang pelajaran yang telah di sampaikan secara tidak sadar, sering merasa takut, cemas, gelisah, bahwasannya siswa berkebutuhan khusus tidak dapat menguasai pelajaran yang di sampaikan dengan baik.

Penelitian yang di lakukan oleh Hariyanti (2004) terhadap 54 guru inklusi di kota Semarang menunjukkan bahwa 25,9% mengalami gejala stres kerja rendah, 13% guru inklusi kota Semarang mengalami gejala stres kerja sedang, dan 61,1% guru inklusi kota Semarang mengalami stres kerja yang tinggi. Begitu pula penelitian yang di lakukan oleh Mukti (2009) terhadap guru inklusi di kota Malang bahwa 43% guru inklusi di kota Malang mengalami stres kerja yang rendah dan 57% guru inklusi di kota Malang mengalami stres kerja yang tinggi.

Berdasarkan fakta yang telah di uraikan di atas jelas bahwa beban tugas guru inklusi sangat berat sehingga memungkinkan bagi para guru inklusi tersebut mengalami stress dalam kerja.

Baum (Taylor, 1991) mengartikan stres sebagai pengalaman emosional negatif yang diiringi dengan perubahan fisiologis, biokimia, dan perilaku yang dirancang untuk mereduksi atau menyesuaikan diri terhadap

sumber stres dengan cara memanipulasi situasi atau mengubah sumber stres dengan mengakomodasi efeknya.

Nevid dkk (2005) mengemukakan bahwa stres dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : cara coping stress, *self efficacy*, ketahanan psikologis, dan optimisme.

Self efficacy menurut Bandura (Feist & Feist, 2006) adalah sebagai keyakinan individu dalam kemampuan melakukan suatu pekerjaan atau tugas serta peristiwa yang terjadi di lingkungan individu.

Alwisol (2006) mendefinisikan *efficacy* sebagai persepsi mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri mampu melakukan tindakan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang telah di persyaratkan. Keyakinan ini mempengaruhi penilaian diri individu terhadap situasi tertentu, seberapa banyak usaha yang di berikan, seberapa lama dapat bertahan dalam menghadapi rintangan, seberapa ulet dalam berurusan dengan kegagalan, dan seberapa besar stres yang di rasakan dalam tuntutan situasi.

Pada guru inklusi *self efficacy* menjadi penting untuk di miliki. Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan stres dan beban kerja dengan *self efficacy* guru yang mengajar di sekolah inklusi di Kabupaten Nganjuk.

penelitian ini di kuatkan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Kusnadi (2014) yaitu *Hubungan Antara Beban Kerja dan Self Efficacy dengan Stres Kerja pada Dosen di Universitas X*.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menjabarkan hubungan antara *Self-Efficacy* dan beban kerja dengan stres kerja pada staf pengajar kelas inklusi di Sekolah Dasar Inklusi Kabupaten Nganjuk

B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara *self efficacy* dan beban kerja dengan stres pada staf pengajar kelas inklusi di SD inklusi (SDN Klurahan 4, SDN Wilangan 1, dan SDN Werungotok 2) Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Mengetahui hubungan antara *self efficacy* dengan stres kerja
- Mengetahui hubungan antara beban kerja dengan stres kerja
- Mengetahui hubungan antara *self efficacy* dan beban kerja dengan stres pada staf pengajar kelas inklusi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada bidang pendidikan khususnya untuk bidang pendidikan inklusi

2. Manfaat Praktis

a. Pengajar

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kompetensi dalam program belajar-mengajar pada kelas inklusi

b. Pemerintah

Di harapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah lebih memperhatikan fasilitas, kompetensi, serta tenaga ahli yang mampu mendukung program sekolah inklusi